

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENILAIAN KEWAJARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN ENREKANG**

**NURHENA  
NIM 105730465914**



**Program Studi Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**ANALISIS PENILAIAN KEWAJARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN ENREKANG**

**NURHENA  
105730465914**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis UNISMUH Makassar**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“hidup itu perjuangan, maka perjuangkanlah.

Dan jika saja kemungkinan itu kecil, maka pastikan  
perjuangan itu besar”

### PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan karya sederhana ini kepada ayahanda dan ibunda tercinta, saudara serta keluargaku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan doa'nya, cinta dan kasih sayangnya hingga penulis bisa menyelesaikan karya yang sederhana ini.**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "Analisis Penilaian Kewajaran Anggaran Penda-  
patan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten  
Enrekang.  
( Studi Kasus di Bappeda Enrekang 2017)"

Nama Mahasiswa : Nurhena  
No. Stambuk : 105730485914  
Program Studi : Akuntansi  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Diperiksa Dan Diujikan Di Depan  
Dosen Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Pada Hari Jumat 31 Agustus 2018 Pada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Andi Jam'an, SE, M.Si  
NBM :0902116603

Muchriana Muchran, SE, M.Si, Ak.CA  
NIDN: 093098801

Mengetahui,

Dekan Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM. 903 078

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.Ca  
NBM. 107 3428





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alaiddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **NURHENA**, NIM: 105730465914, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 0009 /2018 M, Tanggal 19 Dzuhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzuhijjah 1439 H  
Makassar,

31 Agustus 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE, MM  
(Wd I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Aarsal, SE, MM, Ak, CA, Ph.D  
2. Linda Arisanty Razak, SE, M.Si, Ak  
3. Ismail Rasulong, SE,MM  
4. Asriaty, SE, M.Si

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM

NBM 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhena

Stambuk : 105730465914

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Analisis Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang"

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar, dan Skripsi ini telah diujikan pada Tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H  
31 Agustus 2018 M

Yang membuat Pernyataan,

**METERAI  
TEMPEL**  
800FCAPF22 255949  
**3000**  
EKAM HIBURAN  
Nurhena

Diketahui Oleh

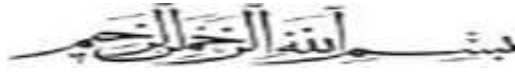
Dekan Fakultas Ekonomi

**Ismail Rasulong, SE. MM**  
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

**Ismail Badollahi, SE. M. Si. Ak. CA**  
NBM: 1073428

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul “ **Analisis Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang ( Studi Kasus di Bappeda Kabupaten Enrekang 2017)**”. Dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Dr.H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.Ca selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Andi jam'an ,SE., M.Si dan Ibu Muchriana Muchran, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah

banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pimpinan serta pegawai Kantor Bappeda Kabupaten Enrekang yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Buat teman-teman akuntansi 1 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
8. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
9. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati



penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya kata semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya Amiin.

Makassar, 2018

**Penulis**

## ABSTRAK

**NURHENA, 2018. Analisis Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang (Studi Kasus di Bappeda Kabupaten Enrekang 2017). Di bimbing oleh Bapak Andi Jam'an dan Ibu Muchriana Muchran selaku pembimbing I dan Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penilaian kewajaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Enrekang (studi kasus di Bappeda 2017). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu peneliti melihat arsip Dpa-Opd yang tersimpan di Kantor Bappeda Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui dari 39 OPD pelaksana kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan yang tidak wajar sedangkan sisanya 33 kegiatan masih masuk dalam kategori wajar. Salah satu dari 6 kegiatan yang tidak wajar tersebut termasuk kategori *overfinance* sedangkan kegiatan lainnya masuk dalam kategori *underfinance*.

Untuk mengetahui kewajaran anggaran maka apabila anggaran kegiatan pada DPA masing-masing OPD tersebut berada di antara batas atas dan batas bawah maka anggaran belanja kegiatan tersebut wajar. Namun bila lebih kecil dari batas bawah maka anggarannya *underfinance* dan sebaliknya bila lebih besar dari batas atas maka anggarannya *overfinance* atau anggaran yang digunakan terlalu tinggi.

**Kata kunci : Kewajaran anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

## ABSTRACT

**NURHENA, 2018. Analysis of Regional Revenues and Expenditures (APBD) of Enrekang Regency (Case Study in Bappeda of Enrekang District 2017). Guided by Andi Jam'an and Mrs. muchriana muchran as counselor I and Counselor II.**

*This study aims to analyze and find out the regional budget (APBD) of Enrekang District (case study in Bappeda 2017). The type of research used in this research is quantitative descriptive, with a data distribution method that researchers see the Dpa-Opd archive stored in the Bappeda Office of Enrekang Regency.*

*Based on the results of the research carried out, it can be concluded that we can find out from 39 OPD who carry out these activities there are 6 activities that are not fair while 33 activities are still in the fair category. One of the 6 activities that are not normal, including the overfinance category, while other activities fall under the category of underfinance.*

*To find out the fairness of the budget, in each DPA activity, each OPD is between the upper and lower limits, therefore the activity expenditure is reasonable. If not, then the funds are less and bigger than the money above the budget too much or the budget is too high.*

*Keywords: Fairness of Budget, Regional Budget and Expenditure*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Tinjauan Teori .....	<b>6</b>
1. Pengertian Anggaran .....	6

2. Fungsi Anggaran .....	7
3. Mekanisme Penyusunan Anggaran .....	9
4. Pengertian APBD .....	10
B. Tinjauan Empiris .....	21
C. Kerangka Konsep .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Defenisi Operasional Variabel .....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	36
B. Hasil Penelitian .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1	Data Ekstrim Kegiatan Penyusun Laporan Kinerja .....	48
Tabel 4.2	Hasil Regresi Sederhana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja .....	49
Table 4.3	Alokasi Masing-Masing Objek Belanja Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja.....	52
Tabel 4.4	Data Kegiatan, Output, dan Anggaran Sosialisasi .....	53
Tabel 4.5	Hasil Regresi Sederhana Kegiatan Sosialisasi .....	55
Tabel 4.6	Alokasi Masing-Masing Objek Belanja Kegiatan Sosialisasi ..	58

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema kerangka pikir.....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan di perbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada system anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, (Muindro Renyowijoyo 2012:54).

Permendagri 13 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis dan transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi

masyarakat. Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut memuat tentang program/kegiatan, anggaran, dan target kinerja yang akan dilaksanakan Oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Semua OPD akan mengusulkan rencana anggaran dan program/kegiatan yang akan mereka laksanakan. Meskipun kita telah mengenal anggaran berbasis kinerja namun dalam prakteknya masih kita temukan OPD yang mengusulkan anggaran secara *incremental*. Penentuan anggaran secara *incremental* yaitu penentuan besaran anggaran dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data-data tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut (Ritonga, 2010).

Penentuan anggaran secara *incremental* dan berdasarkan intuisi OPD ini dapat berakibat terjadinya pemborosan yang diakibatkan oleh kenaikan anggaran suatu kegiatan tanpa memperhitungkan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Dampak lainnya yaitu dapat dimanfaatkan oleh OPD untuk melakukan “ pencitraan” seolah-olah terlihat melakukan penghematan penggunaan anggaran. Kegiatan-kegiatan yang sejenis yang dilakukan oleh beberapa OPD dengan output yang sama tapi dengan jumlah anggaran yang berbeda-beda merupakan salah satu contoh dampak yang diakibatkan oleh tidak adanya standar dalam penentuan anggaran.

Untuk menghindari dampak yang terjadi di atas, maka penyusunan anggaran harus berdasarkan kinerja yang akan dicapai sehingga terciptanya

anggaran daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja tersebut maka perlu dilakukan analisa standar belanja sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran beban kerja Pemendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Berdasarkan Pemendagri 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada ASB dan standar satuan regional.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggunakan ASB dan standar harga satuan tersebut sebagai instrumen dalam pembahasan anggaran daerah. Sebelum menyetujui anggaran yang diusulkan oleh OPD, terlebih dahulu dilakukan penelaahan kesesuaian antara rencana kerja anggaran dengan ASB dan standar harga satuan. Apabila usulan anggaran tersebut tidak sesuai dengan ASB dan standar harga, maka OPD harus melakukan penyesuaian kembali. Dengan penggunaan ASB ini dengan baik dalam penyusunan anggaran belanja daerah maka diharapkan terciptanya anggaran daerah yang efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Dengan adanya ASB ini diharapkan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah berkembang di Sulawesi Selatan terus berupaya melakukan pembangunan untuk mencapai daerah yang maju, aman, dan sejahtera melalui keuangan daerah yang



transfaran yang akuntabel. Untuk mewujudkannya maka Pemerintah Kabupaten Enrekang menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan menggunakan ASB sebagai instrumen penilaiannya.

Dalam APBD Kab. Enrekang tahun 2017 terdapatnya beberapa kegiatan sejenis dengan output yang hampir sama namun anggaran belanja digunakan sangat berbeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau terdapat juga beberapa kegiatan sejenis dengan output yang berbeda namun anggaran belanjanya sama. Contoh : kegiatan Sosialisasi di dinas A dengan jumlah 50 orang memiliki anggaran yang sama dengan jumlah peserta 30 orang.

Kabupaten Enrekang telah menyusun ASB dengan terbitnya Peraturan Bupati Enrekang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Belanja. Namun sejak terbitnya peraturan bupati hingga sekarang ASB tersebut tidak mengalami perubahan dan penyesuaian walaupun telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa serta perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam rentan periode tersebut. Akibatnya yang ditimbulkan dan tidak dilakukan penyesuaian tersebut maka perbub ASB yang telah diundangkan tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik dalam penetapan anggaran. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan perhitungan kembali ASB Kabupaten Enrekang sehingga dapat diterapkan dengan baik guna mewujudkan anggaran yang berkualitas sehingga dapat menarik minat penulis dengan judul **“Analisis Penilaian Kewajaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan permasalahan yaitu: Bagaimana penilaian kewajaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang (Contoh Kasus Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Kegiatan Sosialisasi 2017).

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui penilaian kewajaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Enrekang (Contoh Kasus Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Kegiatan Sosialisasi 2017).

## **D. Manfaat penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Akademis, sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya tentang analisis standar belanja untuk tahun berikutnya.
2. Dapat memberikan bahan masukan dan informasi untuk pemerintah di Kabupaten Enrekang mengenai analisis penilaian kewajaran anggaran belanja terhadap APBD.

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Teori

#### 1. Pengertian anggaran

menurut Mahsun (2013:145), menyatakan bahwa “anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter”. (Dien, Tinangon, & Stanley, 2015) anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret. Ulasan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijalankan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengerahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan pemikiran dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyerahkan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik melakukan pembedaan krusial antara penambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran, dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Jenis anggaran sektor publik, menurut Indra Bastian (2006:164) adalah

- a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/ APBD (*Budget of state*)
- b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/ BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta.

Menurut *National comitte on governmental accounting* (NCGA) yang saat ini telah menjadi *governmental accounting standards board* (GASB), (2006:163) didefinisikan anggaran (*budget*) yaitu, Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

## **2. Fungsi Anggaran**

- a) Fungsi perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti karena anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan uang.

- b) Fungsi pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam pencapaian tujuan (laba).

- c) Fungsi pengendalian

Anggaran merupakan alat pengendalian atau pengawasan (controlling). Pengendalian berarti melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Adapun manfaat anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen kepada seluruh organisasi.
- b. Anggaran memaksa manajemen untuk memikirkan dan merencanakan masa depan.
- c. Proses anggaran dapat mengungkapkan adanya potensi masalah sebelum masalah itu terjadi.
- d. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar digunakan lebih aktif.

Dari beberapa manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja berikutnya, selain itu anggaran juga memiliki manfaat sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan, karena dengan menggunakan anggaran maka perusahaan dapat merencanakan masa depan perusahaan.

### **3. Mekanisme Penyusunan Anggaran**



Dalam rangka Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPBD). Pemerintah daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyusun arah dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Untuk menyiapkan RAPBD pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan APBD, atas dasar:

- a. Rencana tahunan daerah yang dimuat dalam rencana strategi daerah\dokumen perencanaan lainnya.
- b. Penjaringan aspirasi penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat
- c. Data historis mengenai pencapaian kerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya.
- d. Konsep awal arah dan kebijakan umum APBD juga disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran APBD.
- e. Pokok-poko kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah atasan.
- f. Melibatkan Masyarakat pemerhati/tenaga ahli penyusunan konsep arah dan kebijakan umum APBD.

Pemerintah daerah dan DPRD membahas konsep arah dan kebijakan umum APBD sehingga diperoleh kesepakatan antar kedua belah pihak. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama antar pemerintah daerah dan DPRD.

#### **4. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan menurut Bastian (2006:189), “APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja PEMDA dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Menurut, (Widjajanta, Widyaningsih, & Tanuatmodjo, 2014:20) dalam bukunya Ekonomi dan Akuntansi “APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber

pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan kebijakan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut yaitu:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengeolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Berbagai definisi dari para ahli dan Undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):

**a. Anggaran Pendapatan**

Menurut Mardiasmo(2002) penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya pemda merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dan aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Tahap

penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil pendapatan daerah yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

#### **b. Belanja Daerah**

Menurut Margono dalam buku *"Akuntansi Keuangan Daerah"*, (2010:25). "Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Belanja daerah dapat dikelompokkan kedalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian jenisnya, belanja operasi terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan bagi hasil.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi; antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangna pemerintah daerah.

Menurut (Mahmudi, 2009) belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Umum Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

(Halim, 2007) menyebutkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasari pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ini meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sementara itu, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **c. Fungsi APBD**

Menurut (Widjajanta et al., 2014:20) fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- d. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

#### **d. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD**

Menurut (Widjajanta et al., 2014:22) dalam bukunya Ekonomi dan akuntansi, “proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)”. Yaitu, APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah, sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah.

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikut sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan



pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD. Pemerintah daerah membahas bersama DPRD prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun selanjutnya.

Pembahasan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terperinci sampai

dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya.

#### **e. Analisis Standar Belanja**

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan instrumen untuk menilai kewajaran anggaran belanja kegiatan yang diajukan oleh tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Siska, 2009). Selanjutnya Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan publik UGM (2009) menjelaskan Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain :

- a. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
- d. Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Analisis standar belanja merupakan perhitungan mengenai kewajaran belanja suatu program atau kegiatan dengan memperhatikan volume, satuan standar harga, dan target kinerja. Analisis standar

belanja lebih tepat digunakan untuk menilai kewajaran belanja khususnya belanja non modal, sedangkan untuk kategori belanja modal diperlukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menemukan kewajarannya (Mahmudi 2009). Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran (Ritonga, 2010).

Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat anatara lain :

1. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk meaksanakan suatu kegiatan sesuai tupoksinya.
2. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang meyebabkan inefisiensi anggaran.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan.
5. Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri (Ritonga, 2010).

Manfaat yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah ketika menggunakan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut :

- a) Penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi obyektif ( tidak lagi berdasarkan “intuisi”).
- b) Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- c) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
- d) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
- e) Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.
- f) Memiliki argument yang kuat jika “ dituduh” melakukan pemborosan.
- g) Penyusunan anggaran lebih tepat waktu.

#### **f. Dasar Hukum analisis Standar Belanja**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat 3 yang berbunyi: “ Belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 ayat 2 yang berbunyi : “ untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisis belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya”. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 standar analisis belanja adalah sebagai berikut : “ yang dimaksud

dengan standar analisis belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan”.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat 2 yang berbunyi : “ penyusunan anggaran prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 89 ayat 2, yang berbunyi : “ Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :...” dokumen sebagaimana lampiran meliputi KUA,PPA,kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 13 tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100 ayat 2, yang berbunyi :” Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga”.

## **B. Tinjauan Empiris**

Penelitian terdahulu mengenai kewajaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian menjadi referensi yang relevan dengan penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sutjipto Ngumar (2014)	analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dispenda Kota Surabaya	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi	Berdasarkan penelitian ini yang penulis lakukan tentang analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada dinas pendapatan kota Surabaya yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah diterapkan sebagai perbandingan tingkat efisiensi.

No	Nama penelitian	Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
2	Putra R.P (2012)	Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah Dengan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2010 (Studi Kasus : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi)	Metode analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif	Berdasarkan analisa data dan pembahasan diperoleh persamaan regresi linier sederhana dengan ASB untuk anggaran kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) adalah sebagai berikut : belanja rata-rata sebesar Rp. 70.000.000,00 belanja minimum sebesar 59.371.325,70, dan belanja maksimum sebesar 80.628.674,30. Berdasarkan prosentase alokasi belanja dapat diketahui bahwa kegiatan koordinasi di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngawi, dapat diketahui 40% pelaksanaan anggaran..

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
----	---------------	-------	-------------------	------------------

3	Hamzah, Iswan (2011)	Penerapan analisis standar belanja alokasi belanja kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis pada pemerintah provinsi Gorontalo	Metode kuantitatif deskriptif	Berdasarkan Hasil penelitian mengenai Penerapan Analisis Standar Belanja Alokasi Belanja Kegiatan Bimbingan Atau Pelatihan Teknis Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa model ASB yang dikembangkan dalam mengestimasi hubungan total belanja dengan rentang output atau input tertentu adalah baik dan memenuhi linieritas model sehingga dapat digunakan sebagai alat prediksi dalam menentukan kewajaran belanja sebanyak 8 kegiatan mengalami <i>overfinancing</i> . Hal ini menunjukkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan seringkali mengalami kelebihan/kekurangan dari jumlah belanja yang sewajarnya, sehingga dapat menyebabkan ketidakefisienan anggaran. (Hamzah, 2011) Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kebutuhan
---	----------------------	--	-------------------------------	--

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Ni Ketut Erna Rahmawati, I Wayan putra (2016)	analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sum-	Metode yang digunakan adalah metode data kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa



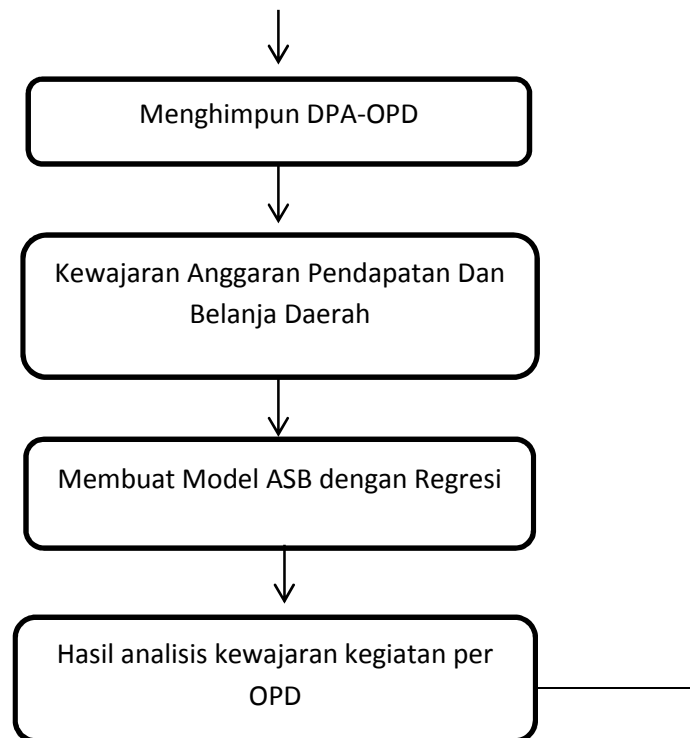
		bawa Tahun Anggaran 2010-2012.	dan data kualitatif	Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Tahun anggaran 2010-2012 tergolong kurang baik.
5	Alek, Murti (2010)	Meneliti mengenai optimalisasi peran analisa standar belanja dalam penyusunan anggaran belanja SKPD di Kabupaten Lingga.	Jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif	Hasil pembahasannya dapat disimpulkan bahwa APBD berbasis kinerja yang disusun oleh pemda harus didasarkan pada SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6	La Ode Hasiara (2013)	meneliti tentang Aparatur melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap jujur sangat dipegang teguh aparaturnya dalam pelaksanaan RKAP dan RKAB. Sikap tersebut dapat memelihara nilai-nilai spiritual dan menjadi filter perilaku dalam melaksanakan RKAP dan RKAB.

### C. Kerangka konsep

Kebijakan umum APBD(KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran (PPA) merupakan dua dokumen utama dalam penyusunan APBD. Kedua

dokumen tersebut harus direncanakan secara matang untuk menghasilkan penganggaran keuangan daerah yang berkualitas. Salah satu instrumen anggaran adalah dengan Analisis Standar Belanja (ASB). Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran.





Gambar 1.1  
Kerangka Konsep

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran dan karakteristik mengenai keadaan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data berupa penilaian kewajaran anggaran belanja terhadap APBD di pemerintah daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2017.

Sumber data yang diperoleh penulis untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisa data, informasi yang terdapat pada laporan atau dokumen yang tersedia, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan berupa dokumen data laporan keuangan dibuat oleh pihak lain (Nuryaman dan Christina v., 2015)

### **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda- Litbang) Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 2 bulan.

### **C. Defenisi Operasional Variabel**

1. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.
2. Belanja variable adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah.
3. Belanja rata-rata adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk satu satuan target kinerja yang hendak dicapai pada suatu kegiatan tertentu yang meliputi belanja langsung.
4. Batas Minimum Belanja adalah proporsi belanja terendah yang diperbolehkan dalam penganggaran keuangan program kegiatan setelah dianalisis dengan ASB.
5. Batas Maksimum Belanja adalah proporsi belanja tertinggi yang diperbolehkan dalam penganggaran keuangan program kegiatan setelah dianalisis dengan ASB.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu anggaran. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang sistematis dan sangat penting dengan tujuan untuk memecahkan pokok permasalahan dalam suatu penelitian.

Dalam mengumpulkan data untuk menganalisis dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari teori dan informasi yang erat hubungannya dengan objek penelitian sebagai pedoman pokok dalam mengumpulkan data di lapangan.
2. Untuk memperoleh data, digunakan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi yaitu melakukan penghimpunan data-data sekunder berupa arsip Dpa-Opd yang tersimpan di Kantor Bappeda Kabupaten Enrekang.

#### **E. Metode Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Nuryaman (2015:06) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh gambaran atau deskriptif tentang karakteristik tertentu dari suatu objek yang sedang menjadi perhatian dalam objek penelitian dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti berdasarkan angka-angka dan penilaian kewajaran anggaran belanja pemerintah Kota Enrekang pada Tahun 2017 dengan pendekatan analisis standar belanja.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

Penelitian ini menggunakan Analisis Standar Belanja, dimana penyusunan ASB dengan pendekatan regresi sederhana.

### **1. Pendekatan Penyusunan Regresi Sederhana**

Analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variable tidak bebas (Y) dengan variable bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Dalam regresi sederhana ini, variable tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variable bebas merupakan cost driver dari kegiatan tersebut. Penggunaan regresi sederhana dalam penyusunan ASB berguna untuk membuat model (persamaan) regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja.

#### **a. Belanja Rata-rata**

Belanja rata-rata adalah belanja rata-rata yang dikeluarkan guna kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan bimtek di OPD Pemerintah Kabupaten Enrekang pada tahun 2017. Untuk menghitung belanja rata-rata maka harus diketahui belanja total kegiatan.

$$Y = a + bX$$

Diminta :

Y =adalah Total Belanja

X =adalah Pengendalian Belanja (*cost driver*)

a =adalah Bilangan Konstanta / intercept

b =adalah Koefisien Regresi

Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari DPA-OPD.

Yang perlu ditaksir adalah koefisien a dan b.

Perlu ditaksir adalah koefisien a dan b.

$$b = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n\bar{X}^2}$$

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n}$$

n = jumlah data

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Dimana:

$\bar{Y}$  =Belanja rata-rata

=Cost Driver rata-rata

a =Belanja Tetap Total (Fixed Cost)

b =Belanja Variabel Perunit (Variable Cost)

#### 1. Batas Minimum dan Maksimum Belanja

Sebelum menghitung batas minimum dan maksimum belanja, terlebih dahulu melihat reliabilitas dari persamaan garis yang



ditaksir, dengan menggunakan kekeliruan baku taksiran (standar deviasi).

Rumus yang digunakan adalah :

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum(Y - \bar{Y})^2}{n - 2}}$$

Bentuk  $(Y - \bar{Y})^2$  disebut pula sebagai jumlah kuadrat kekeliruan.

Jika prediksi terhadap  $\bar{Y}$  berdasarkan sebuah nilai yang ditetapkan telah dibuat, maka kita dapat menentukan interval taksiran untuk  $\bar{Y}$  inidengan menggunakan kekeliruan baku taksiran yang dikemukakan diatas. Dengan demikian batas bawah (minimum) untuk taksiran  $\bar{Y}$  dapat dihitung dengan:

$$- t_p \cdot s_e$$

Sedangkan batas atas (belanja maksimum) taksiran adalah :

$$+ t_p \cdot s_e$$

di mana  $t$  diperoleh dari tabel  $t$  dengan derajat bebas  $n - 2$  - Taraf signifikansinya ( $\alpha = 0,05$ )

## 2. Prosentase Alokasi Belanja

### a. Prosentase Alokasi Belanja Rata-rata

Menghitung prosentase alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) dilakukan dengan cara membagi

total belanja masing-masing objek dengan total belanja suatu kegiatan, lalu dikalikan dengan 100%.

$$\% \text{Belanja Rata-rata} = \frac{\text{Total belanja masing-masing objek}}{\text{Total belanja}} \times 100\%$$

b. Prosentase Alokasi Belanja Minimum

Menghitung prosentase alokasi belanja minimum kepada masing-masing objek belanja dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih prosentase belanja rata-rata dengan belanja minimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja, lalu besarnya prosentase alokasi belanja minimum adalah:

$$\% \text{ Belanja Rata-rata} - \% \text{ alokasi selisih masing-masing objek belanja}$$

c. Prosentase Alokasi Belanja Maksimum

Menghitung prosentase alokasi belanja maksimum kepada masing-masing objek belanja dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu selisih prosentase belanja rata-rata dengan belanja maksimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja, lalu besarnya prosentase.

$$\% \text{ Belanja Rata-rata} + \% \text{ alokasi selisih masing-masing objek belanja}$$

## 2. Verifikasi Kewajaran Anggaran

Untuk menentukan klasifikasi kewajaran belanja dilakukan dengan cara membandingkan anggaran yang ada pada masing-masing kegiatan dengan batas belanja minimum dan maksimum. Jika anggaran berada di bawah batas belanja minimum maka termasuk kategori *underfinance* dan sebaliknya jika anggaran berada di atas batas belanja maksimum maka masuk kategori *Overfinance*, serta jika anggaran berada diantara batas belanja minimum dan maksimum berarti anggaran dikategorikan wajar.

Anggaran kegiatan < Batas minimal belanja = *Underfinance*

Anggaran kegiatan > Batas maksimal belanja = *Overfinance*

Batas Minimal < Anggaran kegiatan < Batas Maksimal = Wajar

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan/Lembaga

Badan perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) PER-DA Kab. Enrekang no.11 Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2011.

##### 2. Visi dan Misi Organisasi

###### a. Visi

- *Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, partisipatif dan berkualitas menuju enrekang maju dan sejahtera.*

###### b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Enrekang 2014-2018 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan keterpaduan program yang berbasis kawasan dan kewilayahan
- Mengoptimalkan system koordinasi perencanaan antar OPD stakeholder, antar daerah, provinsi dan nasional.
- Mengoptimalkan pelaksanaan system / proses perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif.

- Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

## **A. Tugas dan Tanggung jawab**

### **1. Kepala Bappeda-Litbang**

- Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas
- Menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Menyusun rencana strategis dan rencana anggaran badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dengan instansi / Unit Kerja terkait;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta program kerja Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bidang sesuai dengan tugas masing-masing
- Merumuskan dan menetapkan penetapan target kinerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
- Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai dilingkup badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah
- Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan lingkup Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah

## 2. Sekertaris

Mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun Rencana Kerja Sekretariat.
- c. Menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat.
- d. Mengkoordinasikan Rencana Kerjsa dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Kepala Badan serta para Kepala Bidang Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas antar bidang di lingkup Bappeda.
- f. Mendistribusikan Tugas kepada Sub Bagian lingkuo Sekretariat
- g. Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Bappeda.

## 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas :

- a. Merncanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian perencanaan dana keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian perncanaan dan keuangan;
- c. Menghimpun dan menyiapkan bahan –bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan badan;

- d. Memfailitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi badan;
  - e. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodic;
  - f. Menyiapkan penyusunan Dokumen penggunaan Anggaran (DPA) Badan;
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Mempunyai tugas :
- a. Merencanakan kegiatan dan program sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
  - b. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan /penggandaan / pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler.
  - c. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat / pertemuan, komunikasi, dan sarana / prasarana kantor.
  - d. Melaksnakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  - e. Melaksanakan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkup badan;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan / sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah

Mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, DAN RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, PKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Mengoordinasikan Sinergitas dana Harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kab / Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

6. Sub Bidang Prasarana Wilayah

Mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Mengkaji program Kerja Sub Bidang Prasarana Wilayah berdasarkan Program Kerja Bidang dan Rencana Kerja Badan;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas Sub Bidanganya;
- d. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidanganya;



- f. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sub bidang;
  - g. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan Sub Bidang secara berkala;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Sub Bidang Perumahan, Pemukiman, dan Penataan Ruang.
- Mempunyai tugas :
- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas
  - b. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, PKPD urusan PU Perumahan, Pemukiman & Penata Ruang
  - c. Menganalisis Rancangan Renstra perangkat daerah Urusan PU dan Penataan Ruang
  - d. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - e. Membantu kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidang.
8. Sub Bidang Sumber Daya air dan Lingkungan Hidup
- Mempunyai tugas :
- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - b. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, PKPD urusan Sumber Daya Air & lingkungan Hidup;
  - c. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah urusan Sumber Daya Air & lingkungan Hidup;

- d. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sumber Daya Air & lingkungan Hidup;
  - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab / Kota Urusan Sumber Daya Air & lingkungan Hidup;
  - f. Membantu kepala bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidanganya;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - h. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
9. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
- Mempunyai tugas :
- a. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya Dalam untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - b. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Bidang Ekonomi, Sosial Budaya & pemerintahan;;
  - c. Membantu kepala badan dalam pembinaan dan pengembangan Pegawai Lingkup bidang;
  - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam untuk sasaran kerja Pegawai (SKP);
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - f. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi social Budaya dan pemerintahan.

#### 10. Sub Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perdagangan, perindustrian dan Koperasi, Keuangan, penanaman Modal, & pariwisata;
- c. Menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, & Pariwisata;
- d. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- e. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidanganya;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

#### 11. Sub Bidang Sosial Budaya

Mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, pendidikan, KB, pemuda olah raga, kebudayaan masyarakat dan desa transmigrasi, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dan tenaga kerja;
- c. Menganalisis rancangan ranstar perangkat daerah urusan Kesehatan, pendidikan, KB, pemuda olah raga, kebudayaan masyarakat dan desa

transmigrasi, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dan tenaga kerja;

- d. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan Kesehatan, pendidikan, KB, pemuda olah raga, kebudayaan masyarakat dan desa transmigrasi, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dan tenaga kerja;
- e. Merancang pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, pendidikan, KB, pemuda olah raga, kebudayaan masyarakat dan desa transmigrasi, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dan tenaga kerja

## 12. Sub Bidang Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- a. Merancang penyusutan rancangan RPJPD, RPJMD, RPD Urusan Bidang Pemerintahan ; Transtibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan / Masyarakat, Kecamatan, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Kepegawaian, & Sekwan;
- b. Menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah Urusan Bidang Pemerintahan ; Transtibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan / Masyarakat, Kecamatan, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Kepegawaian, & Sekwan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Bidang Pemerintahan ; Transtibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan / Masyarakat, Kecamatan, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Kepegawaian, & Sekwan;

13. Bidang Penelitian Pengembangan, Monitoring Evaluasi, dan Perencanaan Makro

Mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program keterlibangan di daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan keterlibangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi dan kebijakan yang akan disampaikan bupati / walikota dan SKPD dilingkungan kabupaten / kota.

14. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan dan / atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan;
- c. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
- e. Penyusunan konsep system yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;

- f. Perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya;

#### 15. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Mengkaji program kerja sub bidang berdasarkan program kerja bidang dan rencana kerja badan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan program kerja dalam lingkup sub bidang;
- d. Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup sub bidang;

#### 16. Sub Bidang Perencanaan makro

Mempunyai tugas :

- a. Mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- c. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencanadan program kelitbangan di daerah;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati / walikota dan SKPD dilingkungan kabupaten/ kota.

## B. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian tentang kewajaran anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Enrekang terdapat 2 jenis kegiatan yang akan dianalisis kewajaran anggarannya yaitu kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan kegiatan sosialisasi/bimtek.

Dalam pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memecahkan pokok permasalahan dalam suatu penelitian. Untuk dokumen anggaran laporan barang dan jasa dan realisasi belanja barang dan jasa serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Enrekang tahun 2017 peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku seperti arsip DPA-OPD yang tersimpan di kantor Bappeda Kabupaten Enrekang.

### 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja merupakan kegiatan rutin yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaporkan status perkembangan dan capaian kinerja atas program/kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Makin banyak jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu OPD makin banyak juga capaian kinerja yang harus mereka laporkan ke pimpinan daerah. Olehkarena itu maka jumlah kegiatan menjadi *cost driver* untuk ASB ini.

Berdasarkan data **lampiran 1** tersebut terdapat 39 OPD yang melakukan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja. Sekretariat Daerah (setda) merupakan OPD yang terbanyak memiliki kegiatan yaitu

132 kegiatan dan Kecamatan Malua merupakan OPD yang memiliki jumlah kegiatan paling sedikit yaitu 24 kegiatan.

Untuk memperoleh model ASB nya maka akan dilakukan regresi sederhana terhadap data lampiran tersebut. Sebelum melakukan regresi sederhana tersebut maka kita akan mengeluarkan terlebih dahulu data ekstrim sehingga diperoleh hasil regresi yang baik. Data yang ekstrim tersebut mempunyai kecenderungan total anggaran yang dikeluarkan besar dan *cost driver* yang dihasilkan kecil atau total anggaran terlalu kecil dibanding dengan *cost driver* yang dihasilkan. Data ekstrim yang kita hilangkan dapat kita hilangkan dapat kita lihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Data Ekstrim Kegiatan Penyusun Laporan Kinerja**

<b>No.</b>	<b>OPD</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Anggaran Kegiatan</b>
1	Kecamatan Bungin	28	960.000
2	Kecamatan Baroko	28	360.000
3	Dinas Pekerjaan Umum	49	7.200.000
4	Kecamatan Alla	26	580.000
5	Kecamatan Cendana	26	50.000
6	Kecamatan Malua	24	400.000
7	Kecamatan Masalle	29	500.000

Sumber : DPA Tahun 2017 (data diolah)



Setelah data ekstrim tersebut dikeluarkan maka akan dilakukan regresi sederhana dengan menggunakan fasilitas *Data Analysis* yang terdapat pada Ms.pada Excel. Hasil regresi sederhana untuk kegiatan penyusunan laporan kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Regresi Sederhana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja**

<b>SUMMARY OUTPUT</b>					
<b>Regression Statistics</b>					
Multiple R					<b>0,62148</b>
R Square					<b>0,386237</b>
Adjusted R Square					<b>0,365779</b>
Standard Error					<b>660930,3</b>
Observations					<b>32</b>
<b>ANOVA</b>					
	<b>Df</b>	<b>SS</b>	<b>MS</b>	<b>F</b>	<b>Significance F</b>
Regression	1	8,25E+12	8,25E+12	18,87883	<b>0,000147</b>
Residual	30	1,31E+13	4,37E+11		
Total	31	2,14E+13			
	<b>Coefficients</b>	<b>Std Error</b>	<b>t Stat</b>	<b>P-value</b>	
Intercept	1375065	274380,5	5,011527	<b>2,26E-05</b>	
Jum.Kegiatan	24761,91	5698,972	4,344978	<b>0,000147</b>	

Sumber : Lampiran 1 (data diolah)

Berdasarkan hasil regresi sederhana pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai *Significance F* atau *P-Value* yaitu 0,000147 lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kegiatan pada OPD berpengaruh terhadap jumlah anggaran belanja pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja. Koefisien pada variable jumlah kegiatan bernilai positif yaitu 24.761,91, hal ini berarti setiap kenaikan jumlah kegiatan akan menambah jumlah anggaran pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja pada OPD sebesar nilai tersebut.

Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat membuat sebuah persamaan regresi sebagai model ASB untuk kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja. Persamaan regresi sederhananya yaitu :

$$Y = a + b(x)$$

$$Y = 1.375.065 + 24.761,91 (X)$$

Atau dengan kata lain, model ASB untuk kegiatan ini adalah :

$$\mathbf{Belanja\ Total = 1.375.065 + (24.761,91 \times Jumlah\ Kegiatan)}$$

Setelah kita memperoleh model ASB tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan belanja rata-rata, batas minimum dan batas maksimum belanja. Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui standar deviasi dengan melihat nilai *Standard Error*-nya yaitu 660.930,3. Adapun perhitungannya yaitu :

$$\begin{aligned} \text{a) Rata-rata Juml. Keg } (\bar{X}) &= \frac{\sum X}{n} = 1394 / 32 \\ &= 43,5625 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Belanja rata-rata } (\bar{Y}) &= a + b (\bar{X}) \\ \bar{Y} &= 1.375.065 + 24.761,91 \cdot (43,5625) \\ &= 2.453.755,88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) Berdasarkan Tabel t , maka diperoleh nilai } t_p \text{ untuk } n = 32 \text{ yaitu :} \\ 2,042 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) Belanja Minimum} &= \bar{Y} - t_p \cdot S_e \\ &= 2.453.755,88 - 2,042 \times 660.930,3 \\ &= 1.103.956,18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) Belanja Maksimum} &= \bar{Y} + t_p \cdot S_e \\ &= 2.453.755,88 + 2,042272 \times 660.930,3 \\ &= 3.803.555,565 \end{aligned}$$

f) Selisih Persentase Belanja Minimal :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Belanja Rata-Rata} - \text{Belanja Minimum}}{\text{Belanja Rata-rata}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.453.755,88 - 1.103.956,18}{2.453.755,88} \times 100 \% \\
 &= 55,01 \%
 \end{aligned}$$

g) Selisih Persentase Belanja Maksimal :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Belanja Maksimum} - \text{Belanja RataRata}}{\text{Belanja Rata-rata}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3.803.555,565 - 2.453.755,88}{2.453.755,88} \times 100 \% \\
 &= 55,01 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kita dapat mengetahui alokasi maksimal dan minimal masing-masing objek belanja yang dapat dianggarkan dalam kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dapat kita lihat dalam Tabel 4.3.

Untuk mengetahui kewajaran nilai belanja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja yang dianggarkan oleh OPD , maka langkah selanjutnya yaitu menghitung besarnya belanja rata-rata berdasarkan model ASB untuk kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja (Belanja Total = 1.375.065 + (24.761,91 x Jumlah Kegiatan). Sedangkan untuk mengetahui batas minimum anggaran yang dapat dialokasikan oleh OPD maka hasil perhitungan anggaran rata-rata dengan model ASB tersebut dikalikan dengan total persentase batas bawah pada tabel 4.3. Hal yang serupa kita lakukan untuk mengetahui batas atas anggaran untuk kegiatan tersebut yaitu dengan mengalikan hasil perhitungan dengan model ASB dengan total persentase batas atas pada tabel 4.3

**Tabel 4.3**  
**Alokasi Masing-Masing Objek Belanja Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja**

No	OBJEK BELANJA	Anggaran	MEAN	PERHITUNGAN ALOKASI	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
1	2	3	4	5	(4-5)	(4+5)
1	Belanja ATK	49.429.563	62,95	$= 62,95 / 100 \times 55,01 = 34,63$	28,32	97,58
2	Belanja Materai	426.000	0,54	$= 0,54 / 100 \times 55,01 = 0,30$	0,24	0,84
3	Belanja Penggandaan	19.533.625	24,88	$= 24,88 / 100 \times 55,01 = 13,68$	11,19	38,56
4	Belanja Penjilidan	3.917.000	4,99	$= 4,99 / 100 \times 55,01 = 2,74$	2,24	7,73
5	Belanja Makanan dan Minuman	5.214.000	6,64	$= 6,64 / 100 \times 55,01 = 3,65$	2,99	10,29
	Jumlah	<b>78.520.188</b>	<b>100</b>		<b>44,99</b>	<b>155,01</b>

Sumber : Data diolah(2018)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa belanja ATK merupakan objek belanja dengan jumlah alokasi rata-rata tertinggi yaitu 62 % sedangkan belanja materai objek belanja dengan jumlah alokasi rata-rata terendah yaitu sebesar 0,54 %

## 2. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkenalkan program/ produk/ peraturan kepada aparatur atau non-aparatur melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Yang menjadi output dari kegiatan tersebut yaitu jumlah orang dan jumlah hari pelaksanaan sosialisasi. Oleh karena itu maka jumlah orang dan hari pelaksanaan menjadi *cost driver* untuk ASB ini.

**Tabel 4.4**  
**Data Kegiatan, Output, dan Anggaran Sosialisasi**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Output (OH)</b>	<b>Anggaran Kegiatan</b>
1	Sosialisasi Program Transmigrasi (DINKOP UKM NAKERTRANS)	450	27.900.000
2	Sosialisasi Undang - undang Perlindungan Konsumendan Metrologi Legal (DISPERINDAG)	80	9.650.000
3	Sosialisasi Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga instansi terkait (DISPERINDAG)	40	11.200.000
4	Sosialisasi Pertanahan Wilayah Kabupaten Enrekang (PERKIM-TR)	600	55.380.375
5	Sosialisasi dan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemeberdayaan Perempuan dan Anak (DPP-PA)	250	15.910.000
6	Sosialisasi Pergerakan Masyarakat Peduli KB (DISPENDUK-KB)	120	18.500.000
7	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) (DISPENDUK-KB)	100	15.000.000
8	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Secara Dini (DISPENDUK-KB)	120	16.000.000
9	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (DISHUB)	225	30.860.000
10	Sosialisasi Peraturan Tentang Desa/Sosialisasi Hukum (DPMD)	124	28.190.000
11	Sosialisasi/Kampanye Pengawasan (INSPEKTORAT)	800	16.806.083
t	Jumlah	<b>2909</b>	<b>245.396.458</b>

Berdasarkan pada tabel 4.4 maka terdapat 11 kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan OPD pada Tahun 2017 dengan total anggaran yaitu Rp. 245.396.458,-. Sosialisasi Pertanahan Wilayah Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan tata Ruang merupakan kegiatan sosialisasi dengan jumlah anggaran terbesar yaitu Rp. 55.380.375,-. Meskipun dengan jumlah anggaran yang lebih sedikit, namun kegiatan Sosialisasi/Kampanye Pengawasan yang dil-

aksanakan oleh Inspektorat memiliki output yang paling banyak yaitu 800 orang hari (OH).

Untuk memperoleh model ASB nya maka akan dilakukan regresi sederhana terhadap data pada Tabel 4.4 tersebut. Sebelum melakukan regresi sederhana tersebut maka kita akan mengeluarkan terlebih dahulu data ekstrim sehingga diperoleh hasil regresi yang baik. Data yang ekstrim tersebut mempunyai kecenderungan total anggaran yang dikeluarkan besar dan *cost driver* yang dihasilkan kecil atau total anggaran terlalu kecil dibanding dengan *cost driver* yang dihasilkan. Data yang ekstrim pada penelitian ini yaitu Sosialisasi/Kampanye Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Setelah data ekstrim tersebut dikeluarkan maka akan dilakukan regresi sederhana dengan menggunakan fasilitas *Data Analysis* yang terdapat pada Ms. Excel. Hasil regresi sederhana untuk kegiatan sosialisasi tersebut dapat terlihat pada table 4.5 dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Regresi Sederhana Kegiatan Sosialisasi**

<b>SUMMARY OUTPUT</b>					
<b>Regression Statistics</b>					
Multiple R	0,85419				
R Square	0,729641				
Adjusted R Square	0,695846				
Standard Error	7494458				
Observations	10				
<b>ANOVA</b>					
	<b>Df</b>	<b>SS</b>	<b>MS</b>	<b>F</b>	<b>Significance F</b>
Regression	1	1,21E+15	1,21E+15	21,59031	0,001652
Residual	8	4,49E+14	5,62E+13		
Total	9	1,66E+15			
	<b>Coefficients</b>	<b>Std Error</b>	<b>t Stat</b>	<b>P-value</b>	
Intercept	9291441	3760681	2,47068	0,038669	
OH	64331,89	13845,13	4,646538	0,001652	

Sumber : Lampiran 3 (data diolah)

Berdasarkan hasil regresi sederhana pada table 4.5 dapat diketahui bahwa nilai *Significance F* atau *P-Value* yaitu 0,001652 lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah orang dan hari (OH) pada kegiatan sosialisasi berpengaruh terhadap jumlah anggaran belanja pada kegiatan tersebut. Hasil regresi sederhana pada tabel 4.5 juga menunjukkan nilai R Square yaitu 0,73 (73%) yang berarti bahwa variabel OH memiliki kemampuan menjelaskan variasi variabel jumlah anggaran sebesar 73 %, sedangkan sisanya (27%) dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar cost driver tersebut.

Koefisien pada variable jumlah kegiatan bernilai positif yaitu 64.331,89, hal ini berarti setiap kenaikan jumlah kegiatan akan menambah jumlah anggaran pada kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja pada OPD sebesar nilai tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat membuat sebuah persamaan regresi sebagai model ASB untuk kegiatan sosialisasi. Persamaan regresi sederhananya yaitu :

$$Y = a + b(x)$$

$$Y = 9.291.441 + 64.331,89 (X)$$

Atau dengan kata lain, model ASB untuk kegiatan ini adalah :

$$\text{Belanja Total} = 9.291.441 + (64.331,89 \times \text{Jum. Orang} \times \text{Jum. Hari})$$

Setelah kita memperoleh model ASB tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan belanja rata-rata, batas minimum dan batas maksimum belanja. Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui standar deviasi dengan melihat nilai *Standard Error*-nya yaitu 7.494.458. Adapun perhitungannya yaitu :

$$\begin{aligned} \text{a) Rata-rata Jum. Keg } (\bar{X}) &= \frac{\sum X}{n} = 2109 / 10 \\ &= 210,9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Belanja rata-rata } (\bar{Y}) &= a + b (\bar{X}) \\ \bar{Y} &= 9.291.441 + 64.331,89 \cdot (210,9) \\ &= 22.859.037,5 \end{aligned}$$

c) Berdasarkan Tabel t , maka diperoleh nilai  $t_p$  untuk  $n = 10$  yaitu :  
2,306

$$\begin{aligned} \text{d) Belanja Minimum} &= \bar{Y} - t_p \cdot S_e \\ &= 22.859.037,5 - 2,306 \times 7.494.458 \\ &= 5.576.785,43 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) Belanja Maksimum} &= \bar{Y} + t_p \cdot S_e \\ &= 22.859.037,5 + 2,306 \times 7.494.458 \\ &= 40.141.289,567 \end{aligned}$$

f) Selisih Persentase Belanja Minimal :

$$= \frac{\text{Belanja Rata-Rata} - \text{Belanja Minimum}}{\text{Belanja Rata-rata}} \times 100 \%$$



$$= \frac{22.859.037,5 - 5.576.785,43}{22.859.037,5} \times 100 \%$$

$$= 75,60 \%$$

g) Selisih Persentase Belanja Maksimal :

$$= \frac{\text{Belanja Maksimum} - \text{Belanja RataRata}}{\text{Belanja Rata-rata}} \times 100 \%$$

$$= \frac{40.141.289,567 - 22.859.037,5}{22.859.037,5} \times 100 \%$$

$$= 75,60 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kita dapat mengetahui alokasi maksimal dan minimal masing-masing objek belanja yang dapat dianggarkan dalam kegiatan sosialisasi dapat kita lihat dalam Tabel 4.6.

Untuk mengetahui kewajaran nilai belanja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja yang dianggarkan oleh OPD , maka langkah selanjutnya yaitu menghitung besarnya belanja rata-rata berdasarkan model ASB untuk kegiatan sosialisasi (Belanja Total = 9.291.441+ (64.331,89 x Jum. Orang x Jum. Hari). Sedangkan untuk mengetahui batas minimum anggaran yang dapat dialokasikan oleh OPD maka hasil perhitungan anggaran rata-rata dengan model ASB tersebut dikalikan dengan total persentase batas bawah pada tabel 4.6. Hal yang serupa kita lakukan untuk mengetahui batas atas anggaran untuk kegiatan tersebut yaitu dengan mengalikan hasil perhitungan dengan model ASB dengan total persentase batas atas pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Alokasi Masing-Masing Objek Belanja Kegiatan Sosialisasi**

No .	OBJEK BEL-ANJA	Anggaran	Mean (%)	PERHITUNGAN ALOKASI	Min (%)	Max (%)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	26.297.000	11,50	= $11,50 / 100 \times 75,60 = 8,70$	2,81	20,20
2	Belanja Cetak	10.915.000	4,77	= $4,77 / 100 \times 75,60 = 3,61$	1,16	8,38
3	Belanja Penggandaan	12.383.375	5,42	= $5,42 / 100 \times 75,60 = 4,10$	1,32	9,51
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	54.825.000	23,98	= $23,98 / 100 \times 75,60 = 18,13$	5,85	42,12
5	Belanja Perj. Dinas Dlm Daerah	124.170.000	54,32	= $54,32 / 100 \times 75,60 = 41,07$	13,25	95,39
	Jumlah	<b>228.590.375</b>	<b>100</b>		<b>24,40</b>	<b>175,60</b>

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa belanja perjalanan dinas merupakan objek belanja dengan jumlah alokasi rata-rata tertinggi yaitu 54,32 % sedangkan belanja cetak sebagai objek belanja dengan jumlah alokasi rata-rata terendah yaitu sebesar 4,77 %.

#### **A. Pembahasan**

Hasil dari 2 model ASB dan verifikasi kewajaran dengan model ASB yang digunakan untuk menganalisis kewajaran anggaran yang digunakan pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2017.

Untuk dapat mengetahui kewajaran anggaran maka apabila anggaran kegiatan pada DPA masing-masing OPD tersebut berada di antara batas atas dan bawah maka anggaran belanja kegiatan tersebut wajar. Namun bila lebih kecil dari batas bawah maka anggarannya *underfinance* dan sebaliknya bila lebih besar dari batas atas maka anggarannya *overfinance* atau anggaran yang digunakan terlalu tinggi jika anggaran yang berada diantara

batas belanja minimum dan maksimum berarti anggaran dikatakan wajar (Ritonga, 2010).

#### 1. Analisis Standar Belanja penyusunan Laporan Capaian kinerja

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hamzah (2011) mengenai penerapan analisis standar belanja alokasi belanja kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis pada pemerintah kota gorontalo menunjukkan bahwa Kewajaran anggaran kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja masing-masing OPD dapat kita lihat pada **Lampiran 2**. Dari tabel lampiran 2 tersebut kita dapat mengetahui dari 39 OPD pelaksana kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan yang tidak wajar sedangkan sisanya 33 kegiatan masih masuk dalam kategori wajar. Salah satu dari 6 kegiatan yang tidak wajar tersebut termasuk kategori *overfinance* sedangkan kegiatan lainnya masuk dalam kategori *underfinance*.

Dalam hal penganggaran apabila OPD yang anggaran kegiatan sosialisasi mengalami *underfinancing* masalah yang akan timbul adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan. Sedangkan untuk unit kerja yang menikmati *overfinancing*, masalah yang dihadapi adalah efisiensi yang rendah atau pemborosan, apabila kalau dana lebih tersebut dipakai untuk kegiatan lain seperti belanja modal maka akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum mengalami pemborosan atau rendahnya

efisiennya dalam penganggaran kegiatan. Ketidakefisienan tersebut dapat berakibat pada terjadinya pengurangan pada anggaran kegiatan lain di DPU baik yang bersifat rutin kantor maupun kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam hal ini untuk kegiatan penyusunan capaian kerja yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang dari 39 (tiga puluh Sembilan) kegiatan hanya terdapat 1 kegiatan yang penganggarnya overfinance dengan anggaran Rp. 7.200.000,- dimana anggaran setelah ASB sebesar Rp. 2.588.399,- sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp. 4.611.601,- yang kegiatannya tercantum pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2017, yang dinyatakan overfinance atau memakai anggaran yang terlalu tinggi ditemukan kegiatan terbesar atau paling banyak digunakan untuk belanja Alat kantor tulis belanja penggandaan, sedangkan dari sedi alokasi belanja material, belanja penjilidan serta belanja makanan dan minuman masih masuk dalam kategori wajar atau rata-rata.

Oleh karena itu setiap alokasi belanja pada masing-masing kegiatan OPD harus dapat disusun Analisis Standar Belanja yang diperlukan agar tidak terjadi inefisiensi anggaran dalam pengalokasian belanja, sehingga anggaran yang dibelanjakan rasional dan proporsional. Sehingga apabila kegiatan tersebut dimasukkan lagi kedalam tahun berikutnya untuk disusun berdasarkan Analisis Standar Belanja supaya kegiatan tersebut masuk dalam kategori wajar, dan untuk yang sudah masuk kategori wajar harus dipertahankan.

## 2. Analisis Standar Belanja Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan kepada aparatur dan masyarakat supaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh aparatur dan masyarakat dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi pemerintah daerah.

Dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah daerah terhadap PNS dan Masyarakat sehingga PNS dan masyarakat lebih mengenal dan mengetahui peraturan-peraturan dan isu-isu yang akan berlaku serta yang sedang berlaku, sehingga masyarakat dan PNS dapat mengembangkan kemampuan sesuai peran.

Dari 11 (sebelas) kegiatan sosialisasi tidak ada kegiatan yang penganggarannya *overfinance* maupun *underfinance* dan semua kegiatan penganggarannya wajar karena semua kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak melebihi batas maksimal.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dengan menggunakan metode Analisis Standar Belanja (ASB) dapat diketahui bahwa dana-dana yang dialokasikan ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang wajar pada setiap kegiatan disetiap Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu setiap alokasi belanja pada masing-masing kegiatan OPD harus dapat disusun Analisis Standar Belanja yang diperlukan agar tidak terjadi inefisiensi anggaran dalam pengalokasian belanja, sehingga anggaran yang dibelanjakan rasional dan proporsional.

Dengan adanya Analisis Standar Belanja (ASB) diharapkan Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Enrekang memiliki dasar yang kuat dalam mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2012) Berdasarkan analisa data dan pembahasan diperoleh persamaan regresi linier sederhana dengan ASB untuk anggaran kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) untuk penyusunan laporan capaian kinerja adalah sebagai berikut : belanja rata- rata sebesar Rp. 2.453.755,88 belanja minimum sebesar 1.103.956,18 dan belanja maksimum sebesar 3.803.555,565. Berdasarkan prosentase alokasi belanja dapat diketahui bahwa kegiatan koordinasi di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Enrekang dapat diketahui 55,01 % pelaksanaan anggaran. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi belanja rata- rata sebesar Rp.22.859.037,5 belanja minimum sebesar Rp.5.576.785,43 dan belanja maksimum sebesar Rp.40.141.289,567 Berdasarkan prosentase alokasi belanja dapat diketahui bahwa kegiatan koordinasi di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Enrekang dapat diketahui 75,60%

#### **D. VERIFIKASI KEWAJARAN ANGGARAN**

Model ASB yang telah dibuat akan digunakan lebih lanjut dalam mengevaluasi kewajaran nilai belanja 3 (tiga) kelompok kegiatan yaitu kegiatan laporan penyusunan capaian kinerja dan kegiatan sosialisasi.

1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja

OPD yang menganggarkan kegiatan tersebut sebanyak 39 OPD dengan 1.665 kegiatan. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang penganggarnya *overfinance*, 5 (lima) kegiatan yang *underfinance* dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang penganggarnya wajar. Lampiran 2 menggambarkan hasil verifikasi kewajaran anggaran.

2. Kegiatan sosialisasi

OPD yang menganggarkan kegiatan tersebut sebanyak 11 OPD dengan 2909 output. Dari 11 (sebelas) kegiatan sosialisasi tidak ada kegiatan yang penganggarnya *overfinance* maupun *underfinance* dan semua kegiatan penganggarnya wajar karena semua kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak melebihi batas maksimal. Lampiran 2 menggambarkan hasil verifikasi kewajaran anggaran.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengetahui kewajaran anggaran maka apabila anggaran kegiatan pada DPA masing-masing OPD tersebut berada di antara batas atas dan bawah maka anggaran belanja kegiatan tersebut wajar. Namun bila lebih kecil dari batas bawah maka anggarannya *underfinance* dan sebaliknya bila lebih besar dari batas atas maka anggarannya *overfinance* atau anggaran yang digunakan terlalu tinggi jika anggaran yang berada diantara batas belanja minimum dan maksimum berarti anggaran dikatakan wajar.

Kita dapat mengetahui dari 39 OPD pelaksana kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan yang tidak wajar sedangkan sisanya 33 kegiatan masih masuk dalam kategori wajar. Salah satu dari 6 kegiatan yang tidak wajar tersebut termasuk kategori *overfinance* sedangkan kegiatan lainnya masuk dalam kategori *underfinance*.

### B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang hendaknya dapat menggunakan model analisis standar belanja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja, sosialisasi/bimtek dalam proses penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), sehingga dapat terwujud kewajaran anggaran dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten enrekang.



2. Diharapkan di dalam pencapaian output lebih di tingkatkan sehingga dalam mencapai tujuan organisasi akan lebih meningkat dari tahun ke tahun.
3. Suatu kegiatan atau program kegiatan yang dianggarkan OPD harus menerapkan indikator kinerja dengan lebih jelas agar sasaran dari program tersebut dapat dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, W. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- Hamzah, Iswan. 2011, *Penerapan Analisis Standar Belanja Alokasi Belanja Kegiatan Bimbingan Atau Pelatihan Teknis Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Halim, A. (2002). *Manajemen Keuangan Daerah APBD, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasiara, O.L. 2013. *Aparatur melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah batas*. Vol 2, No 13. (di akses 2013)
- Mahmudi, (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, (2013:145). *Anggaran Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Murtin, Alek. 2010. *Optimalisasi peran analisa standar belanja dalam penyusunan anggaran belanja SKPD di Kabupaten Lingga*. (di akses 2010).
- Margono. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Mahsun.
- Ngumar Sutjipto. 2014. *Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja pada Dispenda Kota Surabaya* (di akses 2014), Vol.3 No. 12.
- Ni Ketut Erna Rahmawati, Wayan Putra. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun anggaran 2010-2012 (di akses..2016 Vol 2)
- Putra, R.P. 2012. *Evaluasi Penganggaran Keuangan Daerah Dengan Analisis Standar Belanja (Asb) Tahun Anggaran 2010 (Studi Kasus : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi)*. Tesis

- Peraturan Menteri Dalam Negeri, R.I (2006). *Nomor 13 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Jakarta.*
- Republic Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2011.*
- Ritonga, i. t. (2010). *Analisis Standar Belanja: konsep, metode pengembangan, dan implementasi di pemerintah daerah. Sekolah Pascasarjana UGM:Jakarta.*
- Renyowijoyo Muindro. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.*
- Siska,. 2009. "Konsep Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Akuntansi Sektor Publik
- Widjajanta, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2014). Widjajanta, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2014). *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi, 20–22. CV Citra Praya*

Lampiran 1 Data Jumlah Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja

No.	OPD	Jumlah Kegiatan (X)	Anggaran Kegiatan Penyusunan LAKIP (Y)
1	DISDUKCAPIL	37	3.000.000
2	DISKOMINFO-STATISTIK	36	2.500.000
3	DINKOP UKM NAKERTRANS	44	2.000.400
4	DINAS PERTANIAN	57	3.000.000
5	DISNAKIN	40	2.000.000
6	DISPERINDAG	48	2.000.000
7	BKD-DIKLAT	37	2.500.000
8	MAIWA	30	1.500.000
9	BPBD	33	3.000.000
10	DISDIKBUD	61	4.000.000
11	PERKIM-TR	40	3.000.000
12	DINSOS	44	2.000.000
13	DPP-PA	27	2.700.000
14	SETDA	132	4.510.000
15	SETWAN	38	1.875.000
16	KESBANG POL	26	1.292.000
17	BAPENDA	35	3.300.300
18	DISPENDUK-KB	43	3.000.000
19	DINKES	87	3.000.000
20	INSPEKTORAT	54	2.041.888
21	ANGGERAJA	27	1.000.000
22	BARAKA	27	1.000.000
23	CURIO	27	1.000.000
24	DISKEPAN	28	3.000.000
25	BPKD	54	3.300.300
26	DPM-PTSP	29	2.000.000
27	DISHUB	33	2.500.000
28	DISPUSTAKA	38	3.000.000
29	RSUD MASSENREMPULU	40	2.000.300
30	SATPOL PP-DAMKA	33	2.000.000
31	DPMD	48	3.000.000
32	BAPPEDA-LITBANG	61	2.500.000
33	BUNGIN	28	960.000
34	BAROKO	28	360.000
35	DPU	49	7.200.000
36	ALLA	26	580.000
37	CENDANA	26	50.000
38	MALUA	24	400.000
39	MASALLE	29	500.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017

## Lampiran 2 Analisis Kewajaran Anggaran Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

NO.	OPD	OUTPUT	ANGGARAN	HASIL ASB	BATAS MIN	BATAS MAX	KET
1	DISDUKCAPIL	37	3.000.000	2.291.256	1.030.847	3.551.665	WAJAR
2	DISKOMINFO-STATISTIK	36	2.500.000	2.266.494	1.019.706	3.513.282	WAJAR
3	DINKOP UKM NAKERTRANS	44	2.000.400	2.464.589	1.108.830	3.820.348	WAJAR
4	DINAS PERTANIAN	57	3.000.000	2.786.494	1.253.657	4.319.331	WAJAR
5	DISNAKIN	40	2.000.000	2.365.542	1.064.268	3.666.815	WAJAR
6	DISPERINDAG	48	2.000.000	2.563.637	1.153.392	3.973.882	WAJAR
7	BKD-DIKLAT	37	2.500.000	2.291.256	1.030.847	3.551.665	WAJAR
8	MAIWA	30	1.500.000	2.117.923	952.863	3.282.982	WAJAR
9	BPBD	33	3.000.000	2.192.208	986.285	3.398.132	WAJAR
10	DISDIKBUD	61	4.000.000	2.885.542	1.298.219	4.472.865	WAJAR
11	PERKIM-TR	40	3.000.000	2.365.542	1.064.268	3.666.815	WAJAR
12	DINSOS	44	2.000.000	2.464.589	1.108.830	3.820.348	WAJAR
13	DPP-PA	27	2.700.000	2.043.637	919.442	3.167.832	WAJAR
14	SETDA	132	4.510.000	4.643.637	2.089.194	7.198.080	WAJAR
15	SETWAN	38	1.875.000	2.316.018	1.041.987	3.590.048	WAJAR
16	KESBANG POL	26	1.292.000	2.018.875	908.301	3.129.449	WAJAR
17	BAPENDA	35	3.300.300	2.241.732	1.008.566	3.474.898	WAJAR
18	DISPENDUK-KB	43	3.000.000	2.439.827	1.097.690	3.781.965	WAJAR
19	DINKES	87	3.000.000	3.529.351	1.587.872	5.470.831	WAJAR
20	INSPEKTORAT	54	2.041.888	2.712.208	1.220.235	4.204.181	WAJAR
21	ANGGERAJA	27	1.000.000	2.043.637	919.442	3.167.832	WAJAR
22	BARAKA	27	1.000.000	2.043.637	919.442	3.167.832	WAJAR
23	CURIO	27	1.000.000	2.043.637	919.442	3.167.832	WAJAR
24	DISKEPAN	28	3.000.000	2.068.399	930.582	3.206.215	WAJAR
25	BPKD	54	3.300.300	2.712.208	1.220.235	4.204.181	WAJAR
26	DPM-PTSP	29	2.000.000	2.093.161	941.723	3.244.599	WAJAR
27	DISHUB	33	2.500.000	2.192.208	986.285	3.398.132	WAJAR
28	DISPUSTAKA	38	3.000.000	2.316.018	1.041.987	3.590.048	WAJAR
29	RSUM	40	2.000.300	2.365.542	1.064.268	3.666.815	WAJAR
30	SATPOL PP-DAMKA	33	2.000.000	2.192.208	986.285	3.398.132	WAJAR
31	DPMD	48	3.000.000	2.563.637	1.153.392	3.973.882	WAJAR
32	BAPPEDA-LITBANG	61	2.500.000	2.885.542	1.298.219	4.472.865	WAJAR
33	BUNGIN	28	960.000	2.068.399	930.582	3.206.215	WAJAR
34	BAROKO	28	360.000	2.068.399	930.582	3.206.215	UNDERFINANCE
35	DPU	49	7.200.000	2.588.399	1.164.533	4.012.265	OVERFINANCE
36	ALLA	26	580.000	2.018.875	908.301	3.129.449	UNDERFINANCE
37	CENDANA	26	50.000	2.018.875	908.301	3.129.449	UNDERFINANCE
38	MALUA	24	400.000	1.969.351	886.020	3.052.682	UNDERFINANCE
39	MASALLE	29	500.000	2.093.161	941.723	3.244.599	UNDERFINANCE

Sumber : Data Diolah

### Lampiran 3 Analisis Kewajaran Anggaran Kegiatan Sosialisasi

NO	URAIAN	OUTPUT	ANGGARAN	HASIL ASB	BATAS MINIMUM	BATAS MAKSIMUM	KET
1	Sosialisasi Program Transmigrasi	450	27.900.000	38.240.793	9.329.382	67.152.205	WAJAR
2	Sosialisasi Undang - undang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal	80	9.650.000	14.437.993	3.522.352	25.353.633	WAJAR
3	Sosialisasi Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga instansi terkait	40	11.200.000	11.864.717	2.894.565	20.834.868	WAJAR
4	Sosialisasi Pertanahan Wilayah Kabupaten Enrekang	600	55.380.375	47.890.578	11.683.584	84.097.572	WAJAR
5	Sosialisasi dan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemeberdayaan Perempuan dan Anak	250	15.910.000	25.374.415	6.190.447	44.558.382	WAJAR
6	Sosialisasi Pergerakan Masyarakat Peduli KB	120	18.500.000	17.011.268	4.150.139	29.872.397	WAJAR
7	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	100	15.000.000	15.724.630	3.836.246	27.613.015	WAJAR
8	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Secara Dini	120	16.000.000	17.011.268	4.150.139	29.872.397	WAJAR
9	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	225	30.860.000	23.766.117	5.798.080	41.734.154	WAJAR
10	Sosialisasi Peraturan Tentang Desa/Sosialisasi Hukum	124	28.190.000	17.268.596	4.212.918	30.324.274	WAJAR
11	Sosialisasi/Kampanye Pengawasan	800	16.806.083	60.756.956	14.822.519	106.691.394	WAJAR